

## ANALISIS HUBUNGAN ANTARA PERTUMBUHAN DAN PEMERATAAN DALAM KEBIJAKAN DESENTRALISASI DI INDONESIA TAHUN 1995-2007

**Grisvia Agustin**

Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Malang

### ABSTRACT

*This research analyzes potential trade-off between economic growth and regional equity in the design of fiscal decentralization. A theoretical model of fiscal decentralization is being used, where overall national economic growth and regional equity in the regional distribution of fiscal resources are two objectives pursued by a benevolent policy maker. Solutions that emphasize regional equity tend to have larger central government expenditures and higher contribution to the central budget by richer jurisdictions. The reverse is true for solutions emphasizing growth. The model is tested using Generalized Least Square (GLS). Fiscal decentralization in Indonesia led to significant increases in regional equity.*

### PENDAHULUAN

Hubungan antara pertumbuhan dan pemerataan distribusi pendapatan nasional telah banyak dibahas pada literatur-literatur ekonomi. Diantaranya, penelitian tentang hubungan antara pertumbuhan dan pemerataan distribusi pendapatan nasional yang dipengaruhi penerapan kebijakan desentralisasi fiskal, apakah penerapan kebijakan desentralisasi fiskal mendorong pertumbuhan atau justru menghambat pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah:

- a. untuk mengkaji secara empiris apakah kebijakan desentralisasi fiskal memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi
- b. untuk mengkaji secara empiris apakah kebijakan desentralisasi fiskal memiliki pengaruh terhadap pemerataan distribusi pendapatan
- c. untuk mengkaji secara empiris bentuk hubungan antara pertumbuhan ekonomi dengan pemerataan distribusi pendapatan

Berdasarkan jurnal berjudul *Growth and Equity Trade-off in Decentralization Policy: China's Experience* oleh Baoyun Qian, Jorge Martinez-Vasquez dan Yongsheng Wu dari Department of Economics, Andrew Young School of Policy Studies di Georgia State University yang berisi tentang pengalaman China terhadap pertentangan potensial antara pertumbuhan ekonomi dan

pemerataan regional dalam desain kebijakan desentralisasi fiskal. Mereka membangun model teori desentralisasi fiskal yang dites dengan data panel pada tahun 1985-1998.

Sehingga diketemukan bahwa kebijakan desentralisasi fiskal di China meningkatkan pertumbuhan ekonomi, tapi hubungan ini non-linier. Desentralisasi juga mengarah kepada peningkatan yang signifikan terhadap ketimpangan regional. Dalam penelitian tersebut dinyatakan, kebijakan desentralisasi fiskal disatu sisi dipercaya dapat memacu pertumbuhan ekonomi, sementara disisi lain kebijakan desentralisasi fiskal dipandang tidak bisa mempengaruhi tingkat pertumbuhan ekonomi. Pandangan ini muncul karena kebijakan desentralisasi fiskal memungkinkan adanya penumpukan kekayaan bagi daerah pemilik sumber daya alam (SDA) yang besar. Sehingga kesejahteraan sosial yang ingin dicapai oleh negara dipengaruhi oleh tingkat pertumbuhan ekonomi dan pemerataan dalam pengeluaran fiskal. Desentralisasi fiskal terjadi apabila pengeluaran fiskal pemerintah pusat mengalami penurunan terhadap total pengeluaran pemerintah karena pemerintah daerah mulai dapat mengambil alih pembiayaan terhadap pengeluaran pembangunan. Hasil penelitian tersebut menyatakan adanya *trade-off* antara

pertumbuhan dan pemerataan sehingga kebijakan desentralisasi fiskal dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan mengorbankan ketimpangan antar daerah.

Sedangkan dalam *The Injustice of Inequality* oleh Edward Glaeser, Jose Scheinkman dan Andrei Shleifer (2002) menyimpulkan bahwa ketimpangan sosial dapat memperburuk pertumbuhan ekonomi bagi negara yang tidak menerapkan kebijakan desentralisasi fiskal dengan baik (*poor rule of law*). Sebaliknya, bagi negara yang memiliki aturan desentralisasi yang baik (*good rule of law*), ketimpangan distribusi pendapatan tidak memiliki pengaruh terhadap tingkat pertumbuhan ekonomi nasional.

Sementara itu, Martinez-Vasquez dan McNab (2001) menyatakan bahwa sampai sekarang belum ada teori yang secara baku dapat menyatakan pengaruh kebijakan desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi. Secara teoritis desentralisasi diharapkan dapat meningkatkan pendapatan perkapita masyarakat, namun berdasarkan hasil penelitian empiris yang pernah dilakukan bentuk hubungan antara

pertumbuhan ekonomi dengan pelaksanaan desentralisasi fiskal tidak dapat dirumuskan secara pasti. Bahkan, terdapat pula kemungkinan terjadinya *trade-off* antara pertumbuhan ekonomi nasional dan pemerataan pendapatan antar daerah.

Allen (1990) didalam Kuncoro (2004) menyatakan bahwa tumbuhnya perhatian terhadap desentralisasi tidak hanya dikaitkan dengan gagalnya sistem perencanaan yang terpusat dan populernya strategi pertumbuhan dengan pemerataan (*growth with equity*), tetapi juga adanya kesadaran bahwa pembangunan adalah suatu proses yang kompleks dan penuh ketidakpastian. Oleh karena itu, proses pembangunan tidak dapat dengan mudah dikendalikan dan direncanakan dari pusat.

Para pelopor desentralisasi kemudian mengajukan sederet panjang alasan dan argumen tentang pentingnya desentralisasi dalam perencanaan dan administrasi di negara-negara dunia ketiga. Berikut ini adalah tabel perbandingan konsep-konsep tentang desentralisasi yang terdapat dalam UU no.5/1974 dan UU no.22/1999.

Tabel 1. Perbandingan UU no.5/1974 dan UU no.22/1999

Istilah	UU No. 5/1974	UU No. 22/1999	Keterangan
Pemerintah Pusat	Perangkat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri dari presiden beserta pembantu-pembantunya	Perangkat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri dari presiden beserta para menteri menurut asas desentralisasi	Pada UU yang baru pengertian pemerintah pusat lebih spesifik dengan menyebut presiden dan para menteri.
Desentralisasi	Penyerahan urusan pemerintahan dari pemerintah/daerah tingkat atasnya kepada daerah menjdai urusan rumah tangganya	Penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom dalam kerangka NKRI	UU lama memfokuskan kepada urusan yang bersifat spesifik dan teknis. UU baru memfokuskan kepada wewenang
Dekonsentrasi	Pelimpahan wewenang dari pemerintah / kepala wilayah / kepala instansi vertikal tingkat atasnya kepada pejabat-pejabat di daerah	Pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada gubernur sebagai wakil pemerintah dan atau perangkat pusat di daerah	UU lama menonjolkan sentralisme. UU baru memperlihatkan gubernur mengemban tugas sebagai perangkat pemerintah pusat

Tugas perban tuan	Tugas untuk turut serta dalam melakukan urusan pemerintahan yang ditugaskan kepada pemerintah daerah oleh pemerintah / pemerintah daerah tingkat atasnya dengan kewajiban mempertanggungjawabkan kepada yang menugaskan	Penugasan dari pemerintah kepada daerah dan desa dan dari daerah ke desa untuk melaksanakan tugas tertentu yang disertai pembiayaan, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan mempertanggungjawabkan kepada yang menugaskan	Pada UU lama tampak bahwa aparat dibawah merupakan alat dari aparat diatasnya dalam rangka pemerintahan. Pada UU yang baru, penugasan disertai pembiayaan sehingga dapat menghindari pembinaan kepada perangkat daerah.
Otonomi daerah	Hak, wewenang dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	Kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan	UU lama memuat unsur kewajiban UU baru menekankan bahwa otonomi merupakan kewenangan daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dengan menekankan pada pentingnya aspirasi masyarakat, namun UU baru juga tidak menyebutkan otonomi daerah sebagai suatu hak.
Daerah otonom	Kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah tertentu yang berhak, berwenang dan berkewajiban mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dalam ikatan NKRI, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu, berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam NKRI.	

Menurut Boediono (1985) pertumbuhan ekonomi adalah suatu proses kenaikan output perkapita dalam jangka panjang. Suatu negara dikatakan mengalami pertumbuhan ekonomi apabila tingkat keiatan ekonominya lebih tinggi daripada apa yang dicapai pada masa sebelumnya. Oleh karena itu, proses di dalam pelaksanaan kegiatan perekonomian perlu mendapatkan penekanan karena mengandung unsur dinamis.

Pertumbuhan ekonomi yang dengan disertai pemerataan pendapatan antar daerah merupakan kunci utama pengentasan kemiskinan secara nasional. Apabila sumber pertumbuhan ekonomi hanya terpusat pada daerah-daerah tertentu saja maka akan terdapat kelompok masyarakat yang sangat kaya dan sekelompok masyarakat yang tetap miskin. Kesenjangan ekonomi atau ketimpangan dalam distribusi pendapatan serta jumlah penduduk dibawah garis kemiskinan (*poverty line*) merupakan dua masalah besar yang dihadapi Indonesia. Masalah ketimpangan antar daerah tidak hanya tampak pada ketimpangan perekonomian di pulau Jawa dan luar pulau Jawa, melainkan juga antar Kawasan Barat Indonesia dengan Kawasan Timur Indonesia.

## METODOLOGI

### Model Ekonometri

Pada dasarnya desentralisasi fiskal dapat diamati dari dua sisi, yaitu sisi penerimaan dan sisi pengeluaran. Tapi disini memfokuskan dari sisi pengeluaran sebagai dasar pengukurannya dengan rumus sebagai berikut (Martinez-Vasquez, 2002)

$$FD_{it} = \frac{TE_{it}}{TE_t}$$

Desentralisasi fiskal dapat didefinisikan sebagai proporsi pengeluaran tiap-tiap propinsi yang tercantum dalam APBD sebagai bagian dari total pengeluaran nasional. Variabel  $TE_{it}$  merupakan total pengeluaran bagi propinsi  $i$  pada tahun  $t$  dan  $TE_t$  merupakan total pengeluaran seluruh propinsi di Indonesia pada tahun  $t$ .

Untuk menghitung tingkat distribusi pemerataan sumber daya dengan

menggunakan rumus (Martinez-Vasquez, 2002).

$$EQTY_{it} = \frac{PLX_{it}}{PLX_t} - 1$$

Dimana  $PLX_{it}$  merupakan pengeluaran fiskal perkapita didalam propinsi  $i$  pada tahun  $t$ , dan  $PLX_t$  merupakan pengeluaran fiskal perkapita untuk seluruh propinsi di Indonesia pada tahun  $t$ .

Model yang digunakan adalah model yang digunakan oleh Martinez-Vasquez (2002) dengan rumus sebagai berikut.

$$GRW_{it} = \alpha_0 + \alpha_1 FD_{it} + \alpha_2 FD_{it}^2 + \alpha_3 TAX_{it} + \alpha_4 TAX_{it}^2 + \alpha_5 RW_{it} + \alpha_6 LABR_{it} + \alpha_7 CPTL_{it} + \alpha_8 EQTY_{it} + \alpha_9 Dthn_{it} + \alpha_{10} Dprop_{it} + \varepsilon_{it}$$

$$EQTY_{it} = \beta_0 + \beta_1 FD_{it} + \beta_2 GRW_{it} + \beta_3 TAX_{it} + \beta_4 LABR_{it} + \beta_5 Dthn_{it} + \beta_6 Dprop_{it} + \varepsilon_{it}$$

Dimana  $i$  menunjukkan propinsi  $i$ ,  $t$  menunjukkan tahun  $t$ , serta  $\varepsilon_{it}$  dan  $\varepsilon_{it}$  menunjukkan *stokhastik disturbance terms*.

Definisi variabel yang digunakan adalah:

- GRW : tingkat pertumbuhan GRDP nominal perkapita
- FD : derajat desentralisasi fiskal
- TAX : *tax ratio*, rasio total penerimaan pajak terhadap GRDP nominal tiap-tiap propinsi dalam persentase
- RW : *relatif wealth*, rasio GRDP nominal perkapita tiap-tiap propinsi terhadap nilai rata-rata GRDP nominal perkapita seluruh propinsi di Indonesia dalam persentase
- LABR : pertumbuhan jumlah angkatan kerja
- CPTL : pertumbuhan modal
- EQTY : tingkat pemerataan distribusi pendapatan
- Dthn : variabel boneka untuk tahun Dimana 0 untuk periode sebelum pelaksanaan kebijakan desentralisasi fiskal (tahun 1995-2000) dan 1 untuk periode setelah pelaksanaan kebijakan desentralisasi fiskal (2001-2007)

Dprop : variabel boneka untuk propinsi

Berdasarkan teori, diharapkan kebijakan desentralisasi fiskal akan mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi semakin tinggi. Akan tetapi, semakin tinggi penerapan desentralisasi tidak selalu meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Untuk mengakomodasi fenomena ini dibuatlah variabel baru, yaitu variabel  $FD_{pk}^2$  sebagai variabel independen di persamaan pertumbuhan ekonomi guna mewakili hubungan non-linier antara pertumbuhan ekonomi dan desentralisasi fiskal. Selain itu, juga dimasukkan variabel *tax rate* yang efektif ditingkat propinsi dan variabel  $tax_{pk}^2$  sebagai *proxi* untuk mengetahui besarnya pengaruh pajak dari sektor publik dan sektor swasta terhadap pertumbuhan ekonomi.

Hipotesis yang akan diuji dalam penelitian ini adalah kebijakan desentralisasi fiskal memiliki pengaruh yang positif dan signifikan secara statistik terhadap pertumbuhan ekonomi. Selain itu, kebijakan desentralisasi fiskal juga akan membuat distribusi pendapatan semakin merata antar propinsi di Indonesia.

Dengan kata lain, penerapan kebijakan desentralisasi fiskal dapat membuat pertumbuhan ekonomi semakin tinggi dan distribusi pendapatan semakin adil secara bersamaan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Agar model yang diestimasi memenuhi kriteria *best linear unbiased estimator* (BLUE) maka perlu untuk melakukan uji asumsi klasik terlebih dahulu. Uji asumsi klasik tersebut adalah uji multikolinieritas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi. Tabel 1 menunjukkan hasil dari uji multikolinieritas dengan menggunakan *pair-wise correlation matrix*. *The rule of thumb* terjadinya multikolinieritas adalah *correlation value* antar variabel lebih besar dari |0,80| (Gujarati, 2003).

Dari Tabel 1 dapat dilihat bahwa terdapat empat variabel yang memiliki *correlation value* lebih besar dari |0,80| yaitu variabel Fd

dengan  $Fd^2$  dan Tax dengan  $Tax^2$ . *Correlation value* ini wajar terjadi karena nilai  $Fd^2$  diperoleh dari nilai Fd yang telah dikuadratkan dan  $Tax^2$  diperoleh dari nilai Tax yang telah dikuadratkan. Maka model yang dipakai oleh Martinez-Vasquez (2002) yang diaplikasikan dalam penelitian ini dimodifikasi menjadi sebagai-berikut.

$$GRW_{it} = \alpha_0 + \alpha_1 FD_{it} + \alpha_2 TAX_{it} + \alpha_3 RW_{it} + \alpha_4 LABR_{it} + \alpha_5 CPTL_{it} + \alpha_6 EQTY_{it} + \alpha_7 Dthn_{it} + \alpha_8 Dprop_{it} + \varepsilon_{it}^6$$

$$EQTY_{it} = \beta_0 + \beta_1 FD_{it} + \beta_2 GRW_{it} + \beta_3 TAX_{it} + \beta_4 LABR_{it} + \beta_5 Dthn_{it} + \beta_6 Dprop_{it} + \varepsilon_{it}^7$$

Karena tidak ada variabel lain yang memiliki *correlation value* lebih besar daripada |0,80| maka dapat disimpulkan tidak terdapat multikolinieritas di dalam model yang digunakan.

Model yang diestimasi ini menggunakan metode *Generalized Least Square* (GLS) maka tidak perlu melakukan uji heteroskedastisitas karena metode GLS sudah secara otomatis mengubah varians dari model yang diestimasi menjadi homoskedastisitas (Gujarati, 2003).

Langkah selanjutnya adalah melakukan uji autokorelasi. Pada GLS-2 untuk persamaan dengan variabel dependen *grw*, dapat diketahui nilai  $D-W_{hitung}$  sebesar 2,548 dan  $D-W_{tabel}$   $d_1=1,378$  dan  $d_2=1,717$ . Nilai  $D-W_{hitung}=2,548$  terletak diantara  $4-d_1=2,283$  dan  $4-d_2=2,622$ . Maka kondisi ini memiliki arti bahwa  $D-W_{hitung}$  berada pada daerah dimana tidak dapat disimpulkan (*indecision*) apakah terdapat autokorelasi negatif atau tidak.

Pada GLS-2 untuk persamaan dengan variabel dependen *eqty*, dapat diketahui nilai  $D-W_{hitung}$  sebesar 1,718. Sedangkan  $D-W_{tabel}$   $d_1=1,679$  dan  $d_2=1,788$ . Nilai  $D-W_{hitung}=1,718$  terletak diantara  $d_1=1,679$  dan  $d_2=1,788$ . Kondisi ini memiliki arti bahwa  $D-W_{hitung}$  berada pada daerah dimana tidak dapat disimpulkan (*indecision*) apakah terdapat autokorelasi positif atau tidak.

*Standar deviation* dari data ini memiliki nilai yang relatif kecil bagi semua variabel sehingga data tersebut dapat

Tabel 2. Uji Multikolinieritas

	Grw	Fd	Fd2	Tax	Tax2	RW	Labr	Cptl	Eqty
Grw	1								
Fd	0,0330	1							
Fd2	0,0183	0,9640	1						
Tax	-0,1565	0,5977	0,6850	1					
Tax2	-0,0774	0,6408	0,7375	0,9439	1				
RW	0,0669	0,5197	0,5122	0,2748	0,3685	1			
Labr	0,5850	-0,0858	-0,1160	-0,2307	-0,1763	-0,0284	1		
Cptl	0,3238	0,0414	0,0111	-0,0481	-0,0166	0,1055	0,1648	1	
Eqty	-0,0807	0,5632	0,5289	0,4337	0,4337	0,5827	-0,0776	0,0294	1

Tabel 3. Deskriptif Statistik Data

Variabel	Mean	Std Dev	Min	Max
Propinsi	13,5	7,518094	1	26
Tahun	1998,5	2,296816	1995	2007
Grw ( <i>percentage of growth</i> )	18,61377	18,14641	-26,53352	95,88055
Fd ( <i>fiscal decentralization</i> )	0,0384615	0,0526372	0,0071708	0,3019312
Tax ( <i>tax rate</i> )	0,5315568	0,3850231	0,087094	2,630619
RW ( <i>province's relative wealth</i> )	1	0,8691889	0,243174	4,846916
Labr ( <i>growth rate of labor force</i> )	2,527348	8,0687	-23,41403	30,59826
Cptl ( <i>growth rate of capital</i> )	15,23685	32,52165	-90,93789	245,8437
Eqty ( <i>fiscal equity</i> )	0,5946441	0,6312088	0,0132519	4,529344
D <sub>thn</sub> ( <i>year dummy</i> )	0,25	0,4340574	0	1

digunakan untuk proses estimasi. Tabel 2 dibawah menggambarkan statistik deskriptif dari data yang digunakan.

Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi. Kedua persamaan tersebut diestimasi dengan menggunakan *Generalized Least Square* (GLS). Tabel 3 dan Tabel 4 berisi hasil estimasi dengan menggunakan metode *random effect* pada *Generalized Least Square* (GLS). Model ini menempatkan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pendapatan secara bergantian sebagai variabel independen dan desentralisasi fiskal sebagai variabel independen pada kedua persamaan tersebut. Pada tabel 3 dapat dilihat terdapat 4 jenis hasil

estimasi yang diperoleh dari penerapan metode *Generalized Least Square* (GLS). GLS-1 merupakan *unrestricted model* karena memasukkan variabel boneka untuk tahun ke dalam model utama. GLS-2 merupakan *restricted model* karena mencoba untuk menyederhanakan model utama dengan cara mengenggap tahun penerapan desentralisasi fiskal bisa dikeluarkan dari model karena tidak mempengaruhi hasil estimasi.

Sementara itu, variabel boneka propinsi tetap disertakan dalam persamaan tersebut. Pada GLS-3, variabel boneka untuk propinsi dikeluarkan dari model karena dipandang tidak ada perbedaan antara karakteristik antar propinsi di Indonesia.

Tabel 4 : Hasil Estimasi GLS Variabel Independen Grw

Variabel Independen	GLS-1	GLS-2	GLS-3	GLS-4
Constant	-20,04097 (12,14798)	-19,33023 (12,22238)	21,96976 (3,995827)	21,55395 (3,989189)
Fd	248,4958 (166,0503)	197,4588 (164,5013)	41,30148 (64,84537)	36,0751 (65,82956)
Tax	-21,23915 (10,82101)	-14,86765 (10,24257)	-23,89549 (8,973821)	-20,58406 (8,598439)
RW	28,06506 (8,259235)	27,7148 (8,312083)	1,422991 (1,556398)	1,219204 (1,550723)
Labr	1,305139 (0,1522243)	1,251101 (0,1499806)	1,216484 (0,1410183)	1,163310 (0,1348415)
Cptl	0,1209534 (0,032968)	0,1245757 (0,0331219)	0,120363 (0,0325194)	0,1230098 (0,0325083)
Eqty	-7,506718 (2,794451)	-5,564066 (2,575837)	-6,377732 (2,363227)	-5,235474 (2,187716)
D <sub>thn</sub>	4,896499 (2,831594)	TIDAK	3,496605 (2,764008)	TIDAK
D <sub>prop</sub>	YA	YA	TIDAK	TIDAK
R <sup>2</sup>	0,5371	0,5276	0,4430	0,4378
D-W <sub>hitung</sub>	2,550	2,548	2,535	2,546

Namun, variabel boneka tahun kembali dimasukkan ke dalam model sehingga GLS-3 juga disebut *restricted model*. GLS-4 merupakan *restricted model* dengan *common intercept* karena tidak memasukkan variabel boneka propinsi dan variabel boneka tahun. Selanjutnya digunakan *F-test* untuk menguji apakah *unrestricted model* dapat diubah menjadi *restricted model* atau tidak. H<sub>0</sub> menyatakan bahwa *restricted model* lebih baik daripada *restricted model*. Hasilnya:

❖ GLS-1 (*unrestricted model*) vs GLS-4 (*restricted model*)

$F_{hitung} = 3.5038$  dan  $F_{tabel} = 2.02$  sehingga  $F_{hitung} > F_{tabel}$  maka *restricted model* tidak dapat digunakan dalam persamaan ini.

❖ GLS-1 (*unrestricted model*) vs GLS-3 (*restricted model*)

$F_{hitung} = 2.9883$  dan  $F_{tabel} = 1.91$  sehingga  $F_{hitung} > F_{tabel}$  maka *restricted model* tidak dapat digunakan dalam persamaan ini.

❖ GLS-1 (*unrestricted model*) vs GLS-2 (*restricted model*)

$F_{hitung} = 0.0887$  dan  $F_{tabel} = 1.55$  sehingga  $F_{hitung} < F_{tabel}$  maka *restricted model* lebih baik daripada *unrestricted model*. Oleh karena itu, *unrestricted model* bisa disederhanakan menjadi

*restricted model* dalam persamaan ini.

Pada GLS-4 terdapat 4 variabel independen yang tidak signifikan secara statistik dalam menjelaskan variabel dependen, baik dengan derajat keyakinan 1%, 5% maupun 10%. Ini berarti variabel-variabel tersebut tidak dapat menjelaskan hubungan terhadap variabel dependen secara individual.

Variabel RW (*relatif wealth*), labr (*growth rate of labor force*), dan cptl (*growth rate of capital*) memiliki pengaruh secara positif terhadap grw (*percentage of growth*) dan signifikan secara statistik pada derajat keyakinan 5%. Setiap kenaikan RW sebesar 0,1% akan meningkatkan pertumbuhan rata-rata sebesar 2,77%. Selanjutnya, penambahan jumlah angkatan kerja sebanyak 1% dapat menaikkan pertumbuhan ekonomi rata-rata sebesar 1,25% dan setiap ada pembentukan modal baru sebesar 1% dapat memacu pertumbuhan ekonomi rata-rata sebanyak 0,12%

Sementara itu, variabel eqty (*fiskal equity*) memiliki hubungan negatif dengan pertumbuhan ekonomi dan signifikan secara statistik pada derajat keyakinan 5%. Hubungan negatif ini menunjukkan adanya *trade-off* antara pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pendapatan. Pada saat distribusi

Tabel 5 : Hasil Estimasi GLS Variabel Dependen Eqty

Variabel Independen	GLS-1	GLS-2	GLS-3	GLS-4
Constant	0,0729734 (0,1769527)	0,1338903 (0,1890448)	0,2559101 (0,0997559)	0,3172248 (0,1027377)
Fd	12,46542 (2,630987)	11,77552 (2,813781)	7,954802 (1,259274)	6,922816 (1,283466)
Grw	-0,004215 (0,0022315)	-0,0036953 (0,0023873)	-0,0044696 (0,0022317)	-0,0040966 (0,0024043)
Labr	0,0087448 (0,0054539)	0,0024242 (0,0056711)	0,009364 (0,0053865)	0,0025109 (0,0056132)
Tax	0,0811194 (0,1527447)	0,3241013 (0,1544860)	-0,0269095 (0,1372603)	0,1697435 (0,1395059)
D <sub>thin</sub>	0,3744724 (0,077486)	TIDAK	0,3986383 (0,077619)	TIDAK
D <sub>prop</sub>	YA	YA	TIDAK	TIDAK
R <sup>2</sup>	0,6510	0,5970	0,4009	0,3228
D-W <sub>hitung</sub>	1,786	1,718	1,190	1,126

pendapatan semakin merata sebanyak 0,1 satuan maka pertumbuhan ekonomi akan turun rata-rata sebesar 0,56%. Nilai R<sup>2</sup> sebesar 0,5276 mengandung arti bahwa sebanyak 52,76% variasi variabel dependen dapat dijelaskan oleh variasi variabel independen, sedangkan sisanya dijelaskan oleh faktor-faktor lain diluar model.

Tabel 4 menggambarkan hasil estimasi pengaruh kebijakan desentralisasi fiskal terhadap pemerataan pendapatan. Semua persamaan diatas diestimasi dengan metode *Generalized Least Square* (GLS). Perbedaan antara persamaan yang satu dengan yang lainnya terletak pada variabel boneka yang digunakan. Pada GLS-1, variabel boneka propinsi dan tahun digunakan untuk mengestimasi variabel dependen eqty. GLS-2 memakai variabel boneka propinsi dan tidak memakai variabel boneka tahun, sebaliknya GLS-3 menggunakan variabel boneka tahun dan tidak memakai variabel boneka propinsi. Yang terakhir, GLS-4 tidak menggunakan variabel boneka baik untuk propinsi maupun tahun dalam proses estimasi pemerataan pendapatan. Untuk mencari model yang paling tepat, digunakan F-test. H<sub>0</sub> menyatakan bahwa *restricted model* lebih baik daripada *restricted model*. Hasilnya:

- ❖ GLS-1 (*unrestricted model*) vs GLS-4 (*restricted model*)

$F_{hitung} = 28.4001$  dan  $F_{tabel} = 2.29$  sehingga  $F_{hitung} > F_{tabel}$  maka *restricted model* tidak dapat digunakan dalam persamaan ini.

- ❖ GLS-1 (*unrestricted model*) vs GLS-3 (*restricted model*)  
 $F_{hitung} = 18.0349$  dan  $F_{tabel} = 2.17$  sehingga  $F_{hitung} > F_{tabel}$  maka *restricted model* tidak dapat digunakan dalam persamaan ini.

- ❖ GLS-1 (*unrestricted model*) vs GLS-2 (*restricted model*)  
 $F_{hitung} = 0.7788$  dan  $F_{tabel} = 1.55$  sehingga  $F_{hitung} < F_{tabel}$  maka *restricted model* lebih baik daripada *unrestricted model*. Oleh karena itu, *unrestricted model* bisa disederhanakan menjadi *restricted model* dalam persamaan ini.

Pada GLS-2 terdapat 2 dari 4 variabel independen yang tidak signifikan secara statistik dalam menjelaskan variabel dependen, baik pada derajat keyakinan 1%, 5% maupun 10%. Variabel Fd (*fiscal decentralization*) dan tax (*tax rate*) memiliki pengaruh secara positif terhadap variabel dependen eqty (*fiscal equity*) dan signifikan secara statistik pada derajat keyakinan 5%. Setiap kenaikan derajat desentralisasi fiskal sebanyak 0,1 satuan maka distribusi pendapatan antar daerah menjadi semakin merata rata-rata sebanyak 1,18 satuan. Sementara itu, dengan adanya tambahan rasio penerimaan pajak daerah terhadap GDRP sebanyak 1% menyebabkan peningkatan pemerataan pendapatan rata-rata sebesar 0,32 satuan.

Variabel gw atau tingkat pertumbuhan ekonomi perkapita tidak signifikan secara

statistik pada derajat keyakinan 1%, 5% maupun 10% sehingga variabel ini tidak dapat menjelaskan variabel pemerataan dalam persamaan ini. Kondisi tersebut dapat menjadi indikator awal untuk mengetahui bahwa *potential simultaneity* antar variabel dependen tidak terjadi di dalam model ini. Nilai  $R^2$  sebesar 0,6510 mengandung arti bahwa sebanyak 65,10% variasi variabel dependen dapat dijelaskan oleh variasi variabel independen, sedangkan sisanya dijelaskan oleh faktor-faktor lain diluar model.

## KESIMPULAN DAN SARAN

### KESIMPULAN

Maka dari hasil regresi diatas dapat dijabarkan bahwa secara statistik, penerapan kebijakan desentralisasi fiskal tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia, tapi kebijakan desentralisasi fiskal mempengaruhi pemerataan pendapatan

secara statistik dan kebijakan desentralisasi fiskal berhubungan positif dengan pemerataan pendapatan nasional. Kemudian kesimpulan yang terakhir adalah pemerataan pendapatan mempengaruhi tingkat pertumbuhan GRDP perkapita.

### SARAN

1. Motivasi pada sektor usaha untuk mendorong pertumbuhan ekonomi perlu ditingkatkan pada era penerapan kebijakan desentralisasi fiskal. Pemerintah daerah hendaknya lebih mendorong produksi dari sektor unggulan daerahnya masing-masing.
2. Penerapan desentralisasi fiskal yang mempengaruhi pemerataan pendapatan nasional hendaknya dipertahankan karena isu ketimpangan pendapatan nasional dapat memicu perpecahan negara kesatuan Republik Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

- Allen, H.J.B. *Cultivating the Grass Roots: Why Local Government Matters*. Bombay: International Union of Local Authorities, 1990
- Badan Pusat Statistik. *PDRB Menurut Lapangan Usaha*. Jakarta: BPS, 1995-2005
- , *PDRB Menurut Penggunaan*. Jakarta: BPS, 1995-2005
- , *Statistik Keuangan Pemerintah Daerah Propinsi*. Jakarta: BPS, 1995-2005
- , *Statistik Indonesia*. Jakarta: BPS, 1995-2005
- , *Statistik Keadaan Angkatan Kerja di Indonesia*. Jakarta: BPS, 1995-2005
- Boediono. *Teori Pertumbuhan Ekonomi*. Yogyakarta: Badan Penerbit Fakultas Ekonomi, 1985
- Gujarati, Damodar N. *Basic Econometrics*, 4<sup>th</sup> ed. New York: Mc Graw-Hill, 2003.
- Kuncoro, Mudrajad. *Otonomi dan Pembangunan Daerah: Reformasi, Perencanaan, Strategi dan Peluang*. Jakarta: Penerbit Erlangga, 2004.
- Todaro, Michael P. *Economic Development*. 7<sup>th</sup> ed. New York: Addison-Wesley, 2000.
- The Injustice of Inequality* oleh Edward Glaeser, Jose Scheinkman dan Andrei Shleifer. Fiscal Decentralization and Growth
- Fiscal Polarization and Economic Growth*